

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pertanian memainkan peran penting dalam kehidupan manusia sebagai penyedia bahan pangan, pakan ternak, dan bioenergi (Johansson *et al.* 2010; Ajila *et al.* 2012; Hansen *et al.* 2020). Sektor pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan (Rhofita 2022), menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan sektor pertanian hilir serta merangsang ekspor produk pertanian untuk meningkatkan penerimaan devisa negara (Kusumaningrum 2019; Nooralam *et al.* 2020; Sihombing 2021; Amam dan Rusdiana 2021; Dewi *et al.* 2022; Salsabila *et al.* 2022). Menurut BPS (2023), Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian tahun 2022 meningkat sebesar 2,25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 (Lomban *et al.* 2022). Laju pertumbuhan sektor pertanian berdasarkan PDB seri 2010 pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Dalam Persen) Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,88	3,61	1,77	1,87	2,25
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3,65	3,31	2,14	1,12	2,33
Tanaman Pangan	1,42	-1,73	3,61	-1,40	0,08
Tanaman Hortikultura	6,99	5,53	4,17	0,53	4,22
Tanaman Perkebunan	3,83	4,56	1,34	3,52	1,64
Peternakan	4,61	7,78	-0,31	0,32	6,24
Jasa Pertanian dan Perburuan	3,11	3,17	1,65	1,43	2,65
Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,78	0,37	-0,03	0,07	-1,26
Perikanan	5,19	5,73	0,73	5,45	2,79

Sumber: BPS (2023)

Salah satu subsektor pertanian yang berperan dalam pembentukan perekonomian nasional adalah subsektor perkebunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa subsektor perkebunan memiliki penurunan negatif. Berdasarkan PDB, subsektor 1.64 dari nilai berapa Dikatakan tumbuh tahun 2021, growthnya 3.52 Subsektor perkebunan juga menjadi salah satu andalan ekspor sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19 (Pratinda dan Harta 2021). Ekspor produk pertanian pada tahun 2020 sebanyak 43,82 juta ton atau senilai 30,97 miliar USD meliputi perkebunan 42,32 juta ton, tanaman pangan 422 ribu ton, tanaman hortikultura 444 ribu ton, dan peternakan 628 ribu ton (Kementan 2021).

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan dan penting dalam perekonomian Indonesia baik sebagai penghasil devisa, sumber pendapatan petani, pendorong pertumbuhan wilayah serta sebagai eksportir terbesar minyak sawit di dunia dengan menguasai lebih dari 58 persen pangsa pasar di dunia dan menciptakan lapangan kerja kepada lebih dari 16 juta tenaga kerja (Sipayung 2020; Jamilah 2022; Saragih dan Rahayu 2022; Dewani dan Srifauzi 2023). Kelapa sawit juga merupakan penghasil minyak nabati yang banyak

dibutuhkan oleh sektor industri. Sifat dan kemampuannya membuat minyak kelapa sawit dapat digunakan untuk berbagai peruntukan, seperti minyak masak, minyak industri, dan bahan bakar (biodiesel) (Kaniapan *et al.* 2021). Banyaknya variasi produk turunan minyak kelapa sawit menyebabkan tanaman ini memiliki nilai strategis dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan ekspor bagi Indonesia.

Ditjenbun Kementan (2021) mencatat volume dan nilai ekspor kelapa sawit pada tahun 2020 mencapai 27,64 juta ton atau 18,72 miliar USD. Perkebunan kelapa sawit menarik perhatian berbagai pihak seperti pemerintah, investor dan petani. Hal ini tercermin dari perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit di Indonesia. Kementan (2021) menyatakan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2017 sebesar 14,04 juta hektar dan meningkat menjadi 14,66 juta hektar pada tahun 2021. Status perusahaan perkebunan kelapa sawit dikuasai oleh perusahaan swasta sebesar 54,69 persen; perkebunan rakyat sebesar 41,44 persen; dan perkebunan negara sebesar 3,88 persen.

Total luas perkebunan kelapa sawit rakyat lebih dari 40 persen luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut terdiri atas sejumlah kebun yang masing-masing berukuran sangat kecil (*smallholder*). Menurut Hutabarat (2017), petani kelapa sawit rakyat ialah pekebun yang menanam kelapa sawit, baik secara monokultur maupun tumpang sari dengan tanaman lain dan/atau peternakan dan perikanan yang dikategorikan sebagai usaha kecil. Usaha perkebunan rakyat biasanya tidak berbadan hukum, serta dikelola oleh pekebun sendiri dengan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga ternak. Status lahan kebun kelapa sawit rakyat adalah milik

petani, dan umumnya diusahakan oleh pemilik beserta keluarganya. Luas kebun akan semakin kecil jika pemilik meninggal dan membagikan pada ahli warisnya. Ukuran kebun yang sangat kecil ini berada jauh di bawah skala ekonomi (*economic of scale*) sehingga menghambat pencapaian keberhasilan usaha tani.

Sebagian besar wilayah perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Pulau Sumatera Utara memiliki luas Siapkan datanya dari total berapa ha, berapa milik swasta dan negara dan berapa milik masyarakat Luas Perkebunan kelapa sawit milik swasta pada tahun 2020 lebih dari 628.586 Ha, Luas Perkebunan kelapa sawit milik rakyat pada tahun 2021 lebih dari 442.072,76 Ha. atau 40 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Ditjenbun Kementan 2021). Sumatera Utara merupakan provinsi produsen kelapa sawit terbesar ke empat di Indonesia ditinjau dari luas dan produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usaha tani kelapa sawit. Keadaan tersebut berdampak positif terhadap perekonomian dan berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (2022) bahwa jumlah pekerja kelapa sawit di Sumatera Utara mencapai 212 ribu pekerja pada tahun 2022.

Sejarah tumbuhnya kelapa sawit di provinsi Sumatera utara berawal dari pengamatan selama 4 tahun, dari tahun 1875 hingga 1879 PPKS mencatat awal mula benih sawit masuk ke provinsi Sumatera utara berasal dari kelapa sawit yang di tanam di kebun raya bogor. sehingga telah memasuki umur tidak produktif yang memerlukan peremajaan. Pohon kelapa sawit memiliki umur ekonomis yaitu 25 tahun karena adanya penurunan produktivitas (Ahmad *et al.* 2019). Tanaman kelapa sawit tua tidak memberikan hasil dan pendapatan yang lebih tinggi kepada

petani, serta tidak memberikan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang ditunjukkan. Luas tanaman rusak di Sumatera Utara tahun 2021 mencapai 109 ribu hektar atau 57 persen dari total tanaman rusak di Pulau Sumatera Utara serta produktivitas sebesar 3,70 ton per hektar dimana lebih rendah dari produktivitas kelapa sawit nasional sebesar 4,20 ton per hektar (Ditjenbun Kementan 2021). Umur tanaman yang tua dan penggunaan bibit *illegitim* menjadi salah satu faktor rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat. Hal ini akan berimplikasi pada menurunnya pendapatan petani.

Kabupaten Padang Lawas pada umumnya mata pencaharian masyarakatnya adalah berusahatani kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya luas lahan kelapa sawit dari tahun ke tahun di kabupaten padang lawas. Data perkembangan luas lahan, produksi dan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas disajikan pada tabel 1.

Tabel 2. Luas Lahan (Ha) dan Produksi (Ton) Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019-2021.

Kabupaten	Luas Tanaman (Ha)			Produksi (Ton)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Padang Lawas	34.644,	34.652,	34.698,00	51.5231,82	521.672,73	569.436,36

Sumber: BPS Sumatera Utara

Perkebunan kelapa sawit membutuhkan peremajaan agar dapat menjaga pendapatan petani yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga luasan lahan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian Ismail dan Mamat (2002), tanaman kelapa sawit memiliki tahapan produksi yang secara umum terbagi atas tiga tahap, yaitu (a) Periode Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) (paling lambat 3 tahun setelah tanam), (b) Periode Tanaman Menghasilkan (Mature) hingga mencapai titik puncak antara umur 6 hingga 12 tahun, dan (c)

Periode *Replanting*. Periode ketiga berkaitan dengan peningkatan biaya produksi dan keuntungan yang menurun sehingga membutuhkan peremajaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap. Salah satu program strategis nasional sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional yang rata-rata berkisar 3-4 ton per hektar dan umur tanaman di atas 25 tahun adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). PSR berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* terkait kelapa sawit. Program PSR yang menerapkan *Best Agronomies Practice* (BAP) dan penggunaan bibit unggul agar meningkatkan produksi kelapa sawit tanpa melakukan pembukaan lahan baru. Target Program PSR hingga tahun 2024 seluas 540 ribu hektar dan didukung pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar 30 juta per hektar. Realisasi PSR sejak 2016 hingga Juni 2022 baru mencapai 256 ribu hektar atau 47,40 persen dari target untuk 112 ribu pekebun dan dana 7,01 triliun rupiah. Realisasi tahun 2020 mencapai 94 ribu hektar, tetapi pada tahun 2021 turun menjadi 42 ribu hektar (BPDPKS 2022).

Peremajaan kelapa sawit perlu dilakukan secara menyeluruh, namun hanya sebagian kecil petani yang melakukan peremajaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan yang dihadapi petani. Pada umumnya petani tidak melakukan peremajaan karena kekhawatiran kehilangan mata pencaharian utama pada masa tanaman belum menghasilkan (TBM) serta

keterbatasan modal dan akses ke sumber permodalan. Berdasarkan pertimbangan latar belakang di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kelayakan perkebunan kelapa sawit, pengeluaran rumah tangga petani, persepsi petani serta skema pembiayaan peremajaan agar dapat meningkatkan peremajaan kelapa sawit yang berdampak pada perkebunan kelapa sawit yang lebih efisien, berkelanjutan, dan produktivitas yang maksimal.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana kelayakan peremajaan perkebunan kelapa sawit di Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana skema pembiayaan peremajaan kelapa sawit di Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kelayakan peremajaan perkebunan kelapa sawit di Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.
2. Menganalisis skema pembiayaan peremajaan kelapa sawit di Desa Parmainan Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Bagi petani, penelitian ini diharapkan dapat membantu petani menentukan jumlah tabungan yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya saat peremajaan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan.
2. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk menyusun strategi peremajaan kebun kelapa sawit.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan gambaran mengenai peremajaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelayakan peremajaan kelapa sawit

Peremajaan kelapa sawit merupakan investasi jangka panjang. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim 2005). Atribut penting di dalam investasi yaitu adanya risiko dan tenggang waktu. Mengorbankan uang artinya menanamkan sejumlah dana (uang) dalam suatu usaha saat sekarang atau saat investasi dimulai. Kemudian mengharapkan pengembalian investasi dengan disertai tingkat keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang. Pengorbanan sekarang mengandung suatu kepastian bahwa uang yang digunakan untuk investasi sudah pasti dikeluarkan. Sedangkan hasil di masa yang akan datang bersifat tidak pasti, tergantung dari kondisi di masa yang akan datang (Kasmir dan Jakfar 2011). Tujuan dalam investasi menurut Fahmi *et al.* (2009) adalah (1) terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut; (2) terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan; (3) terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham; dan (4) turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Studi kelayakan usaha tani merupakan analisis mengenai suatu kegiatan investasi apakah akan memberikan manfaat atau hasil jika usaha tani tersebut dilakukan. Analisis kelayakan usaha tani bertujuan untuk mengetahui manfaat dari kegiatan usaha tani. Suatu usaha dapat bertahan secara berkelanjutan jika usaha tersebut memberikan *benefit* atau dalam kata lain usaha tersebut layak untuk

dikembangkan. Usaha tani menurut Soekartawi (2002) pada hakekatnya adalah perusahaan, sehingga seorang petani sebelum mengelola usaha taninya perlu mempertimbangkan antara biaya dan pendapatannya, dengan cara mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu.

Pengukuran kelayakan usaha tani berdasarkan dua aspek yaitu aspek non finansial dan aspek finansial. Kelayakan dari aspek non finansial pada umumnya menggunakan metode kualitatif tanpa memperhitungkan manfaat dan biaya secara kuantitatif dari setiap aspek. Aspek non finansial terdiri atas aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen dan hukum, aspek sosial, ekonomi dan budaya serta aspek lingkungan (Nurmalina *et al.* 2014). Secara umum aspek yang perlu dilakukan studi kelayakannya menurut Kasmir dan Jakfar (2010) adalah:

Aspek hukum. Aspek ini mengenai masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin yang dimiliki.

- a. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini mengenai seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar *market share* yang dikuasai oleh para pesaing.
- b. dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin yang dimiliki.
- c. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini mengenai seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar *market share* yang dikuasai oleh para pesaing.
- d. Aspek keuangan. Aspek ini menilai biaya-biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang akan diterima jika proyek dijalankan. Metode penilaian ini

dengan *payback period*, *net present value*, *internal rate of return*, *profitability index*, *break even point*, serta rasio keuangan lainnya.

- e. Aspek teknis atau operasi. Aspek ini mengenai lokasi usaha, penentuan layout, serta penggunaan teknologi.
- f. Aspek manajemen atau organisasi. Aspek ini terkait para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada.
- g. Aspek ekonomi sosial. Aspek ini melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek tersebut dijalankan. Pengaruh terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosial terhadap masyarakat secara keseluruhan.
- h. Aspek dampak lingkungan. Aspek ini menilai seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik darat, air, udara, manusia, binatang, dan tumbuhan yang ada di sekitar.

Pada aspek finansial juga menghitung analisis risiko. Analisis risiko penting untuk semua keputusan keuangan khususnya dengan penganggaran modal. Salah satu risiko yang terjadi yaitu risiko pasar dimana adanya ketidakpastian dalam arus kas bisnis. Teknik yang dapat memperkirakan risiko bisnis adalah analisis sensitivitas dan analisis *switching value*. Analisis sensitivitas untuk mengetahui tingkat sensitivitas usaha dari perubahan suatu variabel dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Analisis *switching value* untuk mengetahui maksimal perubahan yang dapat ditoleransi. Analisis kelayakan aspek finansial memiliki kriteria investasi yang menjadi tolak ukur (Nurmalina *et al.* 2014)

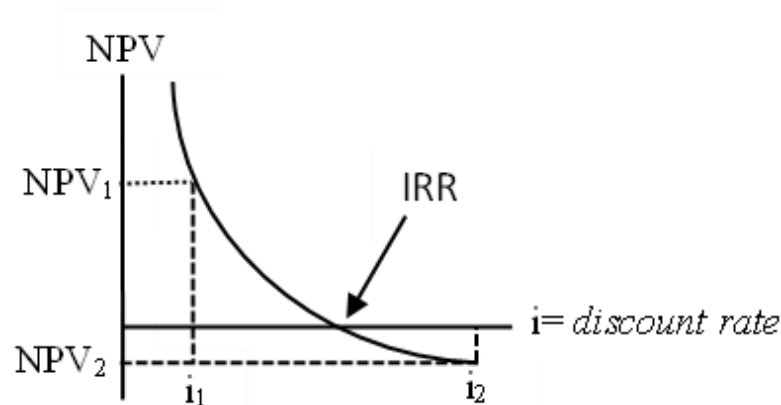
Pada aspek finansial juga menghitung analisis risiko. Analisis risiko

penting untuk semua keputusan keuangan khususnya dengan penganggaran modal. Salah satu risiko yang terjadi yaitu risiko pasar dimana adanya ketidakpastian dalam arus kas bisnis. Teknik yang dapat memperkirakan risiko bisnis adalah analisis sensitivitas dan analisis *switching value*. Analisis sensitivitas untuk mengetahui tingkat sensitivitas usaha tani dari perubahan suatu variabel dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap. Analisis *switching value* untuk mengetahui maksimal perubahan yang dapat ditoleransi. Analisis kelayakan aspek finansial memiliki kriteria investasi yang menjadi tolak ukur (Nurmalina *et al.* 2014) yaitu:

1. *Net Present Value* (NPV) adalah jumlah *present value* dari manfaat bersih tambahan selama umur bisnis atau selisih antara total *present value* manfaat (*benefit*) dengan total *present value* biaya (*cost*). Usaha tani dikatakan layak atau bermanfaat untuk dilaksanakan jika memiliki manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Jika NPV lebih besar dari nol, usaha tani layak secara finansial sehingga dapat dilaksanakan. Jika NPV sama dengan nol, usaha tani tetap layak dilaksanakan namun keuntungan relatif dari tingkat suku bunga. Jika NPV kurang dari nol berarti bisnis tidak layak untuk dijalankan karena memiliki manfaat yang lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, sumber daya yang digunakan dalam usaha tani sebaiknya dialokasikan pada usaha tani lain yang lebih menguntungkan.
2. *Net Benefit Cost Ratio* (Net B/C) adalah perbandingan antara keuntungan dari usaha dengan biaya yang dikeluarkan atau rasio antara manfaat bersih yang bernilai positif dengan manfaat bersih yang bernilai negatif. Suatu

usaha tani juga dinyatakan layak jika nilai Net B/C lebih besar dari satu, artinya setiap tambahan satu satuan biaya yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan lebih dari satu satuan. Ketika Net B/C kurang dari satu, usaha tani tidak menguntungkan atau tidak layak untuk dijalankan karena satu satuan biaya yang dikeluarkan hanya menghasilkan kerugian. Net B/C sama dengan satu maka tidak memiliki keuntungan atau kerugian.

3. *Internal Rate of Return* (IRR) adalah tingkat *discount rate* yang menghasilkan NPV sama dengan nol. Tujuan perhitungan IRR untuk mengetahui persentase keuntungan dari usaha tani tiap tahunnya dan menunjukkan kemampuan Bisnis dalam mengembalikan bunga pinjaman. Usaha tani dinyatakan layak apabila nilai IRR lebih besar dari *opportunity cost of capital*. Perhitungan IRR dengan metode interpolasi diantara tingkat *discount rate* yang lebih rendah (menghasilkan NPV positif) dan *discount rate* yang lebih tinggi (menghasilkan NPV negatif). Metode interpolasi untuk menghitung IRR dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1.

Hubungan antara NPV dan IRR (dimodifikasi dari Nurmalina *et al.* (2014))

4. *Payback Period* (PP) merupakan metode yang mengukur seberapa cepat pengembalian investasi dengan membandingkan nilai investasi dan

manfaat bersih dan mengabaikan nilai waktu uang (*time value of money*). Semakin cepat investasi modal dapat kembali, maka semakin baik usaha tani diusahakan karena modal yang kembali dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang lainnya. Nilai *payback period* dinyatakan layak jika lebih kecil dari umur bisnis. Akan tetapi, jika sampai usia usaha tani berakhir dan belum dapat mengembalikan modal yang dikeluarkan, maka usaha tani tersebut tidak layak dijalankan.

Penelitian tentang kelayakan usaha tani sawit telah dilakukan seperti penelitian Affandi dan Alfizar (2017) yaitu usaha tani kelapa sawit di Kabupaten Lampung Tengah layak diusahakan dilihat dari nilai *Net B/C* 24,85; *Gross B/C* 5,61; *PP* 6,24; *NPV* 167.455.232,56 dan *IRR* 47 persen. Usaha tani kelapa sawit tidak sensitif terhadap kenaikan biaya sebesar 7,26 persen, namun sensitif terhadap penurunan harga jual 25 persen dan penurunan produksi 18 persen pada kriteria investasi *Gross B/C* dan *NPV*. Penelitian lain dari Aznur *et al.* (2020) menunjukkan bahwa secara finansial, usaha tani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pasaman Barat layak dan menguntungkan petani yang dibuktikan dengan nilai *B/C* sebesar 1,36 dan nilai *NPV* sebesar 87.225.402,27. Hasil analisis sensitivitas dengan skenario jika pupuk anorganik tidak disubsidi pemerintah menunjukkan adanya penurunan keuntungan petani sebesar 42,30 persen akan tetapi usaha tani kelapa sawit rakyat tetap layak untuk diusahakan.

Penelitian Bakce dan Mustofa (2021) menunjukkan bahwa secara ekonomi kegiatan usaha tani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu layak untuk dilakukan dengan memberikan sumbangan pendapatan bersih sebesar Rp395.474,00 per hektar per bulan dan *RCR* sebesar 2,24. Penelitian Aryadi dan

Away (2023) menunjukkan bahwa usaha tani kelapa sawit rakyat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara layak diusahakan dengan nilai NPV sebesar 76.873.169; IRR sebesar 111,27; Net B/C sebesar 1,56; Gross B/C sebesar 1,34; dan nilai *payback period* adalah 7 tahun 7 bulan. Analisis sensitivitas pada penurunan harga kelapa sawit sebesar 20 persen dan kenaikan harga input kelapa sawit 15 persen masih layak diusahakan.

Penelitian lain dari Astiani *et al.* (2023) menunjukkan bahwa usaha tani kelapa sawit di Desa Petalongan Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir secara finansial dinyatakan layak untuk dilaksanakan dengan nilai NPV sebesar Rp208.225.657,00; Net B/C 10,08; dan IRR 24,90 persen. Lama waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi adalah 8 tahun 3 bulan. Berdasarkan analisis sensitivitas dengan kenaikan harga pupuk sebesar 16 persen dan penurunan harga jual sawit segar sebesar 50 persen maka masih memberikan keuntungan

2.2. Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit

Peremajaan perkebunan kelapa sawit telah menjadi fokus pemerintah sejak 2017 dalam rangka perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit Indonesia serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Dalam mendukung pelaksanaan peremajaan di perkebunan sawit rakyat, pemerintah Indonesia mengeluarkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program peremajaan sawit rakyat merupakan upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru, baik secara keseluruhan maupun secara bertahap (BPDPKS 2021). Pelaksanaan program tersebut diatur melalui kebijakan kelembagaan dan tata kelola PSR. Dasar hukum peremajaan kelapa sawit terdiri atas:

1. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan
3. Perpres No. 66 Tahun 2018 jo. No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
4. Permentan No. 18 Tahun 2016 Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
5. Permenkeu No. 84 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS
6. Permentan No. 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
7. Peraturan Dirut BPDPKS No. 9/DPKS/2019
8. Kepdirjenbun No. 208/Kpts/KB.120/7/2019

Realisasi PSR yang rendah disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti:

(1) legalitas lahan petani belum lengkap, (2) Belum bankable-nya petani dan kelembagaan petani, (3) verifikasi usulan PSR yang birokratis, dan (4) bermasalahnya rekening petani. Permasalahan ini diatasi dengan simplifikasi persyaratan dan proses (Kemenko Perekonomian 2021; BPDPKS 2021).

Menurut Kotagama *et al.* (2013) peremajaan adalah praktik budi daya dalam pengelolaan tanaman tahunan untuk menstabilkan dan memaksimalkan pendapatan antar waktu. Di tengah isu keterbatasan areal, peremajaan menjadi solusi untuk memaksimalkan produksi. Peremajaan menjadi cara yang tepat untuk mendorong produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, karena pada

generasi pertama, perkebunan kelapa sawit cenderung menggunakan bibit tidak unggul atau tidak bersertifikat sehingga produktivitas rendah. Menurut Hutasoit *et al.* (2015), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan peremajaan kelapa sawit adalah waktu peremajaan dilakukan, kriteria tanaman yang akan diremajakan, jenis bibit yang akan digunakan dan sumber dana untuk membiayai peremajaan.

Jenis peremajaan kelapa sawit terbagi dua, yaitu peremajaan dini dan peremajaan reguler. Peremajaan dini adalah penggantian tanaman sawit muda berumur 10 hingga 25 tahun milik petani atau perkebunan rakyat yang menghadapi masalah produktivitas rendah (kurang dari 10 ton per hektar per tahun) akibat kesalahan bibit dengan tanaman sawit yang baru. Peremajaan reguler adalah penggantian tanaman sawit berumur lebih dari 25 tahun dengan tanaman sawit yang baru (BPDPKS 2021).

Berbagai alternatif model peremajaan kelapa sawit yang dapat digunakan oleh petani diantaranya adalah tanam ulang total, tanam ulang *underplanting*, dan tanaman ulang *intercropping*. Hasil studi Marunung *et al.* (2014) menyatakan bahwa ketiga model peremajaan tersebut layak secara finansial. Hasil penelitian tersebut merekomendasikan tanam ulang *intercropping* dengan tanaman pangan selama masa vegetatif tanaman kelapa sawit. Model ini masih memberikan penghasilan bagi petani selama periode TBM (tanaman belum menghasilkan). Penanaman yang serentak akan menghasilkan tanaman yang pertumbuhannya seragam serta memudahkan pemeliharaan dan pemanenannya.

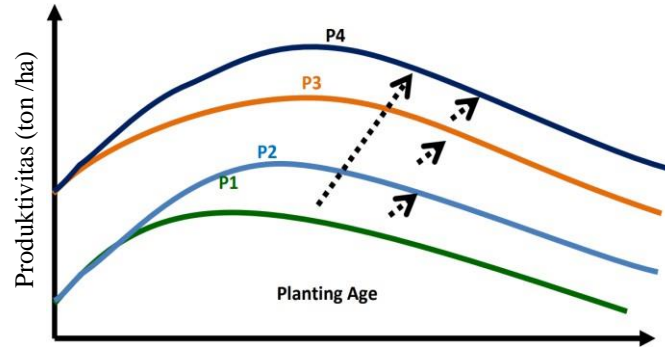
Berdasarkan penelitian Fauzia *et al.* (2021), peremajaan kelapa sawit dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi *replanting* adalah memenuhi syarat menjadi kekuatan yang terdiri atas motivasi, kepemilikan lahan, pengalaman petani dan petani sebagai anggota kelompok tani/koperasi unit desa. Kelemahan terdiri atas modal, pengetahuan petani, dan hilangnya sumber pendapatan petani. Pada faktor eksternal terdapat peluang dan ancaman untuk *replanting* kelapa sawit. Aksesibilitas terhadap pabrik kelapa sawit, dukungan pemerintah, ketersediaan benih dan pupuk serta penggunaan biodiesel menjadi peluang petani melaksanakan *replanting*.

Sedangkan ancaman dalam peremajaan kelapa sawit terdiri atas fluktuasi harga, profesionalisme pengurus koperasi unit desa, dan kampanye negatif. Produksi kelapa sawit berbentuk U terbalik karena perkebunan kelapa sawit hanya memiliki satu siklus produksi hingga 25 tahun yang dapat dilihat pada Gambar 4 (Purba 2019). Pada umur 3 sampai 4 tahun, tanaman sudah dapat dipanen. Produktivitas tertinggi akan tercapai pada umur 8 sampai 20 tahun dan setelah itu mulai menurun. Setelah umur 25 tahun, tanaman memasuki tahap *replanting*. Dari segi ekonomi terdapat dua cara untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

Cara pertama melalui mengelola kebun tanaman menghasilkan yang ada dengan baik sehingga produktivitas meningkat dan menggeser kurva produktivitas perkebunan kelapa sawit saat ini (P1) ke kurva produktivitas baru (P2). Cara kedua melalui penggunaan benih yang lebih unggul saat *replanting*. Cara ini menggeser kurva produktivitas dari P1 ke P3. Penggabungan kedua cara tersebut, yaitu perbaikan kultur teknis pada areal panen dan peremajaan dengan menggunakan benih unggul akan menghasilkan peningkatan

produktivitas total secara berkesinambungan. Kombinasi ini akan menggeser kurva produktivitas dari P1 ke P4 dan seterusnya.



Gambar 2.

Peningkatan produktivitas akibat perbaikan budaya teknis (P2 dan P4) dan faktor produktivitas total (P3) (dimodifikasi dari Purba (2019))

Kebun kelapa sawit membutuhkan investasi dengan nilai yang signifikan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari tahap pembangunan hingga peremajaan. Petani juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit untuk memenuhi biaya operasional. Pembiayaan untuk membangun, memelihara, dan meremajakan kebun kelapa sawit mereka dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan. Selain itu tanaman kelapa sawit mulai berbuah di tahun ke – 4 dan ke – 5, sehingga pada tahun pertama hingga tahun ketiga tanaman belum menghasilkan (TBM). Berdasarkan penelitian Sahara *et al.* (2018), ada tiga aspek penting yang perlu menjadi pertimbangan ketika mempelajari akses petani kecil terhadap pembiayaan.

Pertama, identifikasi berbagai skema pembiayaan yang tersedia untuk petani kelapa sawit. Kedua, identifikasi perspektif pemberi pinjaman (formal dan informal) terkait efektivitas skema pembiayaan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan investasi petani kecil, yaitu di awal pembukaan kebun dan biaya operasional pemeliharaan kebun sawit. Aspek ketiga adalah identifikasi

perilaku petani kecil ketika meminjam dana dalam kaitannya dengan arus kas kebun kelapa sawit yang petani usahakan pembiayaan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan investasi petani kecil, yaitu di awal pembukaan kebun dan biaya operasional pemeliharaan kebun sawit. Aspek ketiga adalah identifikasi perilaku petani kecil ketika meminjam dana dalam kaitannya dengan arus kas kebun kelapa sawit yang petani usahakan.

Menurut Hutabarat (2017), kondisi perkebun yang memiliki pendidikan rendah, akses pada sumber daya produksi yang terbatas, dan penerapan peraturan yang kurang tegas menyebabkan perluasan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dikelola dan dikendalikan pemerintah serta memiliki daya rusak yang cukup tinggi. Sebagian besar pekebun rakyat juga memiliki kendala dalam bidang permodalan.

Pendapatan petani sawit yang rendah tidak dapat digunakan sebagai sumber modal untuk pengembangan usaha. Kemampuan finansial yang rata-rata cukup rendah ini menyebabkan pengadaan faktor-faktor produksi tidak dapat dipenuhi sesuai dengan standar yang seharusnya (Hutabarat 2017). Pinjaman berupa kredit perbankan juga sulit didapatkan oleh pekebun kecil, karena petani tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak perbankan. Permasalahan ini yang menyebabkan tingkat produktivitas maupun mutu hasil yang dicapai pekebun kelapa sawit rakyat sangat rendah.

Terdapat beberapa lembaga pembiayaan dalam usaha tani perkebunan kelapa sawit, mulai dari lembaga keuangan formal hingga informal. Lembaga keuangan formal seperti perbankan, pemerintah, koperasi, perusahaan sawit, dan lembaga keuangan mikro, sedangkan informal seperti individu, pemberi pinjaman,

pedagang lokal, teman, serta kerabat yang pada umumnya tanpa perjanjian tertulis. Petani kecil memiliki sumber pendanaan yang terbatas dalam mengusahakan kebun kelapa sawit mereka. Akses terhadap pinjaman dapat membantu petani miskin untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitas dalam strategi mengurangi kemiskinan (Binswanger dan Khandker 1995; Chitungo dan Munungo 2013), namun menurut Sahara *et al.* (2018) terdapat kesenjangan yang signifikan terkait jumlah maupun aksesibilitas, antara kebutuhan dana pinjaman petani kecil kelapa sawit dengan pasokan dana pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya.

Sebagian besar pinjaman yang disetujui untuk petani kecil hanya dapat digunakan sebagai modal kerja dan tidak dapat untuk menutupi biaya peremajaan. Jangka waktu pinjaman yang tersedia juga menimbulkan permasalahan tersendiri mengingat *gestation period* yang cukup lama pada komoditas kelapa sawit. Kesenjangan-kesenjangan tersebut merupakan faktor penghambat bagi petani kecil untuk mengakses kredit yang bersumber dari pembiayaan formal. Kondisi ini pada gilirannya akan membuka peluang masuknya pembiayaan yang bersumber dari kredit informal dengan suku bunga yang lebih tinggi. Mariyah (2018) menyatakan bahwa petani saat ini masih membutuhkan bantuan pembiayaan dari luar rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian Risman dan Iskamto (2018) sesuai RAB yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau sekitar 58 juta rupiah per hektar yang artinya dalam satu kapling yang luasnya 2 hektar akan menghabiskan anggaran kurang lebih 116 juta rupiah. Biaya tersebut merupakan biaya sangat besar yang harus ditanggung oleh petani dalam proses *replanting* kebun kelapa

sawit. Hal ini akan menjadi kendala dalam pelaksanaan program *replanting* sebab selain petani anggota koperasi tidak memiliki anggaran sebesar itu, juga sulitnya mencari pihak perbankan yang sanggup membiayai dana tersebut, dimana pengembalian pinjaman tersebut menunggu 4 sampai 5 tahun setelah tanaman menghasilkan.

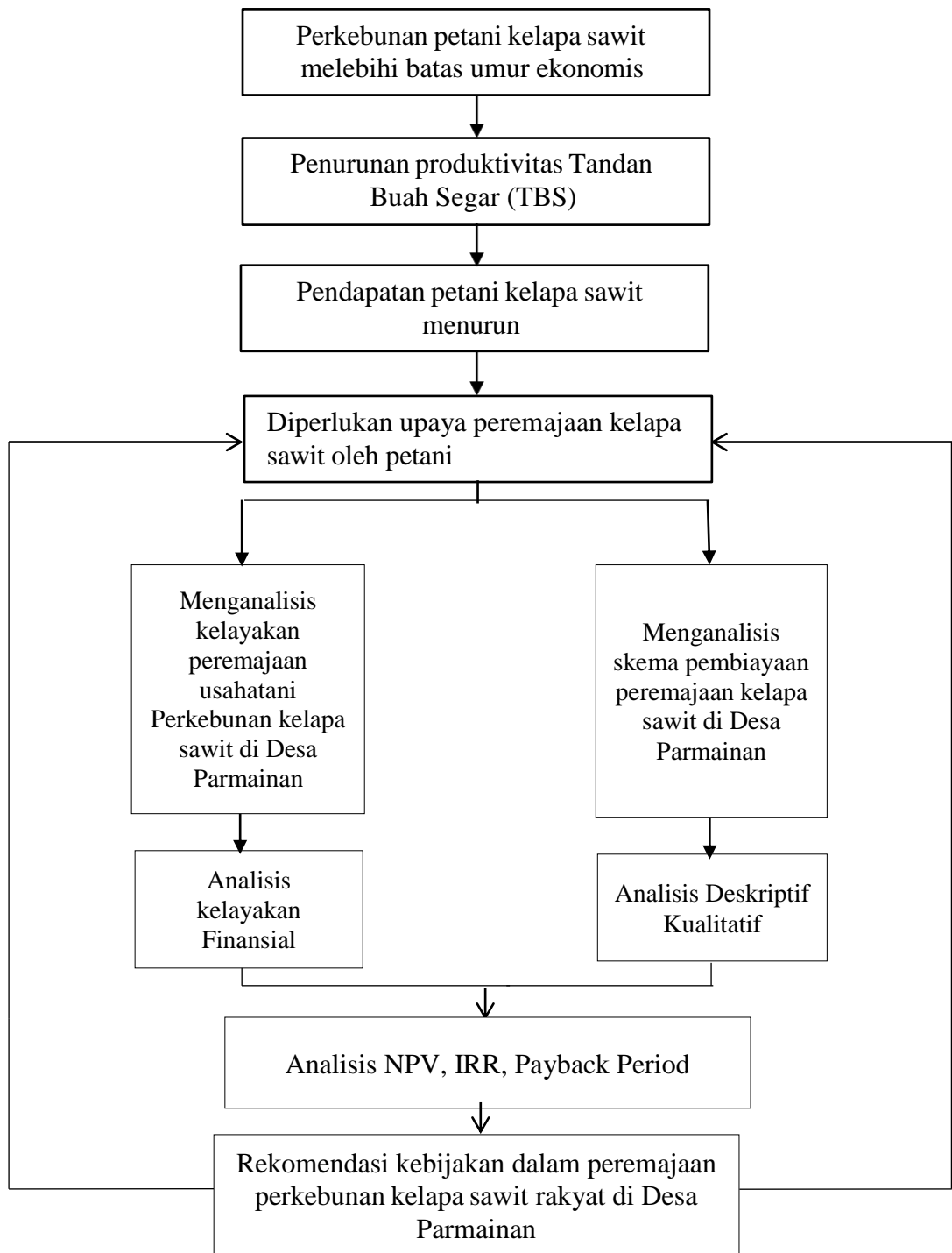
2.3. Kerangka Pemikiran

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah berkembang tidak hanya diusahakan oleh perusahaan negara, tetapi juga perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan rakyat (PR) melalui pola mandiri dan perkebunan inti rakyat (PIR). Pada tahun 2022, penyumbang terbesar produksi kelapa sawit di Indonesia adalah PBS sebesar 61,17 persen atau 29,50 juta ton, kemudian PR sebesar 33,73 persen atau 16,27 juta ton, diikuti oleh perkebunan besar negara (PBN) sebesar 5,08 persen atau 2,45 juta ton. Rata-rata produktivitas di Indonesia selama tahun 2020-2022 adalah 3,87 ton per hektar (Ditjenbun Kementan 2021). Petani rakyat diharapkan dapat menggandakan produksi dan mengelola 60 persen dari luas perkebunan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2030 (Suhada *et al.* 2018).

Tanaman kelapa sawit milik pekebun yang ditanam pada awal pengembangan kelapa sawit dengan pola perusahaan inti rakyat (PIR) pada tahun 1980-an telah melampaui umur ekonomisnya. Tingkat produktivitas kebun kelapa sawit rakyat cukup rendah. Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti umur tanaman yang sudah tua dan bahan tanam yang tidak unggul (*illegitim*) sehingga perlu upaya penggantian tanaman melalui peremajaan. Sasaran peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah pada perkebunan kelapa sawit yang lebih dari 25 tahun dan produktivitas kurang dari 10 ton per hektar per

tahun, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan peremajaan usaha tani kelapa sawit.

Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun secara nasional, namun pada realisasinya peremajaan perkebunan kelapa sawit mengalami beberapa hambatan seperti hilangnya pendapatan petani selama tanaman belum menghasilkan, persepsi petani terhadap peremajaan dan tingginya biaya peremajaan. Berdasarkan penelitian Mariyah (2018), keputusan petani untuk melakukan peremajaan dipengaruhi oleh sumber pembiayaan rumah tangga dan sumber pembiayaan eksternal. Pembiayaan dari eksternal dapat berupa hibah dana peremajaan dari pemerintah melalui BPDPKS kepada petani kelapa sawit sebesar 30 juta rupiah per hektar, namun dana ini dinilai tidak cukup untuk total kebutuhan dana peremajaan sampai tanaman menghasilkan. Petani tetap harus menyiapkan dana pribadi untuk melaksanakan peremajaan melalui tabungan, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis pengeluaran rumah tangga, persepsi petani terhadap peremajaan kelapa sawit, dan skema pembiayaan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Kerangka alur pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3.
Diagram Kerangka Berpikir